



Gerakan Perempuan pada Abad 19-20

The Women's Movement in the 19-20 Century

Amanda Syakiyah Rahmanita ^{1✉}

^{1✉} Universitas Airlangga

E-mail: amanda.syakiyah.rahmanita-2020@fib.unair.ac.id

Diterima: 20 Juli 2022 | Direvisi: 29 Agustus 2022 | Diterbitkan: 15 November 2022

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Organization,
Movement,
Women.

Women's organizations are formed from among women themselves, because of the self-awareness of women. The steps taken by women figures throughout history are proof of the seriousness of Indonesian women to lay the foundation for the women's movement in the name of humanity and social justice. Fujinkai was one of the organizations that were allowed to remain standing during the Japanese occupation. This article will discuss the women's movement that emerged in the 19-20 centuries, by explaining the role of several women at that time. This discussion is limited temporally, namely in the pre-independence period only. In writing articles, the author uses the historical method by going through a series of stages such as gathering sources (heuristics), verification (historical criticism, validity of sources), interpretation, and writing. From this research resulted in several discussions, namely: 1) Women and the nature of humanity, 2) Women's movements in the colonial period, 3) Women during the Japanese colonial period.

Kata Kunci:

Organisasi,
Gerakan,
Perempuan.

Organisasi perempuan terbentuk dari kalangan perempuan sendiri, karena adanya kesadaran diri dari para perempuan. Langkah-langkah yang diambil oleh tokoh-tokoh perempuan sepanjang lintasan sejarah merupakan bukti keseriusan perempuan Indonesia untuk meletakkan dasar bagi gerakan perempuan atas nama kemanusiaan dan keadilan sosial. Fujinkai merupakan salah satu organisasi yang diizinkan tetap berdiri pada masa pendudukan Jepang. Artikel ini akan membahas gerakan perempuan yang muncul pada abad 19-20, dengan menjelaskan peranan beberapa perempuan pada saat itu. Pembahasan ini dibatasi secara temporal, yakni di masa pra-kemerdekaan saja. Dalam penulisan artikel, penulis menggunakan metode historis dengan melalui serangkaian tahap seperti pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi, dan penulisan. Dari penelitian ini dihasilkan beberapa pembahasan, yakni: 1) Perempuan dan hakikat kemanusiaan, 2) Gerakan perempuan di masa kolonial, 3) Perempuan pada masa penjajahan Jepang.

PENDAHULUAN

Jepang menduduki Indonesia selama 3 setengah tahun yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang memberikan sumbangsing yang cukup besar kepada Indonesia, adanya perubahan-perubahan yang memungkinkan

terjadinya revolusi (Ricklefs, 2011). Kebijakan yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia untuk membangkitkan rasa nasionalis jauh lebih bagus daripada masa pendudukan Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, warga Indonesia diberikan kesempatan untuk

mengikuti latihan militer yang dilakukan oleh PETA (Pembela Tanah Air).

Kekuatan Jepang mulai melemah pada tahun 1942, namun Jepang tetap berusaha untuk bertahan dalam menghadapi serangan musuh. Pada saat itu sekutu menyerang pertahanan Jepang di Pasifik dan berbagai medan perang Jepang, namun peperangan itu dimenangkan oleh sekutu. Kekalahan tersebut membuat Jepang mendorong pemerintah kolonial untuk melakukan politik partisipasi kepada bangsa Indonesia. Perempuan pada saat itu dihimpun untuk masuk dalam organisasi Fujinkai (Suhartono, 2006).

Sebagai makhluk sosial perempuan dan laki-laki itu sama, memiliki hak yang sama untuk berkembang, namun dalam realisasinya perempuan selalu dianggap “kedua” dalam hal apapun, yang mengakibatkan perempuan selalu mengalami kesulitan untuk menikmati hak yang seharusnya dimilikinya (Hadriana, 2003). Ahli filsafat pada abad XVIII dan abad XIX mengatakan bahwa kaum perempuan itu lebih lemah daripada kaum laki-laki. Ada salah satu tokoh pemikir Inggris yang berhaluan liberal mendefinisikan liberal sebagai semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Dikalangan elite para filsuf Yunani pada masa Yunani Kuno, perempuan ditempatkan di dalam istana-istana, tetapi di kalangan bawah, perempuan-perempuan menjadi aset komoditi yang diperjualbelikan. Dalam kehidupan rumah tangga, para perempuan ini berada dibawah kekuasaan suaminya, yang tidak memiliki hak sipil dan hak waris (Sayid, 2000). Freud (1856-1939) mengatakan bahwa dunia itu dunianya laki-laki, dimana perempuan diukur dengan kaca mata

laki-laki dan harus ditentukan oleh laki-laki juga. Pandangan Freud ini disebut dengan *Phalocentric*, yang artinya organ kelamin laki-laki yang sebagai sumber kekuasaan (Sadili, 1995).

Perempuan di Yunani dikategorikan menjadi 3 macam yaitu: Sebagai pelacur (pemuas nafsu laki-laki), selir-selir (merawat kesehatan tubuh tuannya), sebagai istri. Posisi perempuan tidak lagi berkisar pada hal ini. Pada akhirnya rumah bordil (bordil) menjadi pusatnya perhatian semua segmen masyarakat Yunani. dan semua keputusan dari Pusat (bersifat nasional) sedang pengaruh perempuan. Tempat tinggal menjadi tempat ibadah karena Aphrodite (Cinta dan Dewi) memang menghadirkan perempuan-perempuan cantik yang mengkhianati suaminya tiga dewa lainnya.

Di Indonesia sendiri, Kartini dijadikan sebagai dasar gagasan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi emansipasi perempuan. Orientasi yang dibawa oleh Kartini ini lebih fokus terhadap tingkatan kecerdasan secara individual, yang memiliki pencapaian mengangkat martabat kaumnya agar sejajar dengan kaum laki-laki. Tujuan gerakan itu yaitu untuk menyamaratakan hak dengan kaum laki-laki dan juga agar perempuan dapat hidup lebih mandiri, tidak tergantung dengan laki-laki.

Pada awal abad ke-19, perempuan-perempuan Indonesia telah hadir di panggung sejarah dalam membela tanah air, seperti R.A Kartini (1879-1904), Cut Nyak Dien (1873-1904), Dewi Sartika (1884-1947), dll. Pada tahun 1928 merupakan titik balik dari perjuangan gerakan perempuan, dimana pada saat itu dilaksanakannya Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta (Mukmin, 1980). Dewi Sartika

membuka pendidikan khusus wanita, yang bernama “Sekolah Istri atau Sekolah Gadis” dan resmi dibuka pada tanggal 16 Januari 1904. Sekolah itu pertama kali didirikan di Bandung, dan memiliki pengaruh yang cukup besar.

Terdapat juga kelompok-kelompok perempuan yang bersifat keagamaan, kelompok itu bernama “Sopo Tresno” pada tahun 1917 kelompok itu menjadi bagian perempuan Muhammadiyah atau yang disebut dengan “Aisyiyah”. Pada tahun 1925, muncul persarikatan Islam di Yogyakarta dengan nama “Wanodya Utomo” (Hadriana, 2003). Setelah tahun 1920-an makin banyak perkumpulan-perkumpulan perempuan yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, hal ini disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran perempuan-perempuan untuk berkontribusi dalam sebuah organisasi.

Dalam artikel ini, peneliti akan membahas gerakan perempuan yang muncul pada abad 19-20, dengan menjelaskan peranan beberapa perempuan pada saat itu. Pembahasan ini dibatasi secara temporal, yakni di masa pra-kemerdekaan saja. Sehingga dalam konteks ini, tujuan penulisan dilakukan untuk mengkaji lebih dalam terhadap hakikat kemanusiaan bagi perempuan serta gerakan perempuan yang muncul pada masa kolonial dan masa penjajahan Jepang.

METODE

Dalam artikel ini, yang sesuai dengan judulnya. Maka, penulis menggunakan metode historis dalam penelaahannya, dan ada beberapa tahapan, sebagai berikut. Tahap Pertama adalah tahap mencari dan membaca (*Browsing*

for Ideas) dan Tahap Kedua adalah menemukan dan mengelola idea (*Analyzing for Idea*). Tahapan selanjutnya yakni seperti pada umumnya ketika akan menulis sejarah yaitu 1. Pengumpulan Sumber (Heuristik), 2. Verifikasi (Kritik Sejarah, Keabsahan sumber), 3. Interpretasi, 4. Penulisan (Kuntowijoyo, 2013).

Heuristik merupakan tahapan pengumpulan sumber-sumber sejarah atau disebut data sejarah. Sumber itu dibagi dalam beberapa jenis: tertulis dan tidak tertulis. Karena penelitian ini membahas tentang kontribusi, maka arsip merupakan sumber terpenting atau disebut dengan sumber primer yang akan digunakan oleh penulis. Penulis mengumpulkan sumber dari perpustakaan-perpustakaan dan lebih banyak menggunakan sumber data sekunder dan ada juga beberapa arsip berupa surat kabar pada tahun itu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu Verifikasi, Verifikasi digunakan untuk menilai sumber-sumber yang akan digunakan untuk penelitian. Dalam penilaiannya terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern, kritik ekstern bertujuan untuk menilai bentuk atau bahan dari sumber secara keseluruhan, dan kritik intern bertujuan untuk menganalisis isi dari sumber tersebut dengan cara melakukan pengujian terhadap kesahihan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan perempuan pada masa pendudukan Jepang (Kuntowijoyo, 2013).

Dalam hal ini penulis melakukan verifikasi dengan melakukan uji keabsahan mengenai otentitas buku referensi baik dengan kritik ekstern, maupun intern. Secara eksternal sumber-sumber yang dipakai oleh peneliti yang merupakan sumber sekunder dengan bentuk

fisik yang masih dalam keadaan baik dan terjaga secara halaman maupun penjidannya.

Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta fakta atau bukti sejarah. Sejarah sebagai suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dapat diungkap kembali oleh para penulis sejarah melalui berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut berbentuk data-data (Kuntowijoyo, 2013)

Penulisan sejarah (Historiografi) menjadi sarana mengomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi. Setelah melakukan pengumpulan data, kritik sumber dan menafsirkan maka tahapan atau langkah yang terakhir adalah penulisan data-data yang telah melewati beberapa proses penyaringan hingga menjadi sebuah kesimpulan akhir yang relevan, sehingga data tersebut dapat ditulis dan dipaparkan sesuai dengan kerangka tulisan dalam bentuk penulisan sejarah. Historiografi tidak bisa lepas dari sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh, dimana pada tahap ini penulis akan menulis kembali peristiwa masa lampau yaitu Kontribusi Perempuan Ketika Kemerdekaan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang berdasarkan data-data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan dan Hakikat Kemanusiaan

Pada hakikatnya, perempuan dan laki-laki itu sama, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perempuan dan laki-laki dapat secara beriringan menjalankan tugas dan hak kewajiban masing-masing tanpa ada pandangan mana yang lebih kuat dan lemah. Perempuan "identik" dengan makhluk

yang lemah lembut, anggun dan lainnya, dengan sebutan itulah perempuan semakin dianggap lemah oleh laki-laki. Kita perlu secara kolektif memahami bahwa laki-laki dan perempuan terikat pada dunia untuk berbuat baik pada segala sesuatu di sekitar mereka, bukan untuk saling mengalahkan. Presiden Soekarno pernah berkata: "Laki-laki dan perempuan seperti dua sayap burung. Jika kedua sayap sama kuat, burung itu akan terbang ke puncak tertinggi. Jika salah satu dari dua sayap itu patah, ia tidak dapat terbang. "Bangunlah. Burung". Jadi, belajarlah untuk saling memberdayakan, jangan saling memperdayakan.

Norma gender, aturan yang sering tidak diucapkan yang mengatur atribut dan perilaku yang dihargai dan dapat diterima oleh laki-laki dan perempuan, adalah apa yang menyatukan sistem gender. Norma-norma tertanam dalam institusi dan mendefinisikan siapa yang menduduki posisi kepemimpinan, yang kontribusinya dihargai, dan yang kebutuhannya diakomodasi (Pearse & Connell, 2015). Dengan cara ini, norma gender yang membatasi mereproduksi dan menopang hierarki kekuasaan di antara perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga pondasi yang diperlukan untuk dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Terdapat kemajuan selama beberapa dekade terakhir bahwa lebih banyak anak perempuan pergi ke sekolah, lebih sedikit anak perempuan yang dipaksa menikah dini, lebih banyak perempuan melayani di parlemen dan posisi kepemimpinan, dan undang-undang sedang direformasi untuk memajukan kesetaraan gender. Terlepas dari

pencapaian ini, tantangan tetap ada di mana undang-undang dan norma sosial yang diskriminatif tetap merajalela dan 1 dari 5 perempuan dan anak perempuan melaporkan mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam jangka waktu 12 bulan. Hal ini dapat dilihat dari kaca mata hakikat sebagai manusia.

Hakikat kemanusiaan menekankan hak dan kebebasan individu yang setara bagi perempuan dan laki-laki dan mengecilkan perbedaan seksual. Hakikat kemanusiaan membela rasionalitas yang setara dari jenis kelamin dan menekankan pentingnya penataan peran sosial, keluarga, dan seksual dengan cara yang mempromosikan pemenuhan diri otonom perempuan. Mereka menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan daripada perbedaan rata-rata di antara mereka, menghubungkan sebagian besar perbedaan kepribadian dan karakter antara jenis kelamin dengan konstruksi sosial gender, dan cenderung mempromosikan satu set kebijakan androgini bagi perempuan dan laki-laki.

Gerakan Perempuan Masa Kolonial

Gerakan perempuan mulai muncul di Indonesia pada akhir abad ke-19. RA Kartini (1879-1904) adalah salah satu perempuan yang paling menonjol dan populer dalam membela hak-hak perempuan, yang ditunggu-tunggu oleh kolonialisme (Arbaningsih, 2013). Pengaruh kolonial Belanda sangat mengurangi kontribusi perempuan dalam politik Jawa. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga Jawa juga sangat ditekankan oleh konsep Belanda yang menekankan laki-laki sebagai pencari nafkah

dan perempuan ditugaskan untuk peran domestik.

Budaya Jawa menekankan bahwa pada masa dewasa perempuan akan diasingkan dan dibentuk untuk memainkan peran di ranah domestik seperti memasak, berdandan, dan melahirkan. Akibatnya, banyak anak perempuan tidak memiliki akses terhadap pengetahuan dan dunia luar.

Wanita bangsawan Jawa adalah pihak yang haknya dibatasi. Mereka tidak berhak atas kesempatan pendidikan yang luas seperti laki-laki dari kalangan mereka. Perkawinan menunjukkan hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki berhak mengawini lebih dari satu perempuan, sehingga perempuan menjadi pihak yang dirugikan.

Dasar gerakan perempuan pada masa kolonial adalah keinginan untuk membuka layanan pendidikan bagi perempuan, menghapuskan pernikahan dini dan poligami, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tampil di depan umum dan mendapatkan upah yang setara, memerangi prostitusi, serta memberikan pendidikan seks. Selama pergerakan nasional, gerakan perempuan menghimpun diri dalam sebuah organisasi. Latar belakang kesadaran tersebut adalah bahwa masyarakat hukum adat yang masih terjerat dalam bangsa kolonial berhak atas kebebasan untuk berkumpul dan bersatu dalam rangka meningkatkan status masyarakat hukum adat. Organisasi perempuan terbentuk dari kalangan perempuan sendiri, organisasi massa, organisasi partai politik, agama, hingga organisasi pemuda nasional.

Organisasi wanita pertama di Indonesia, Putri Mardika (1912) adalah organisasi wanita yang berafiliasi dengan Budi Utomo. Selanjutnya pada tahun 1913 hingga 1920, organisasi-organisasi perempuan juga muncul di Jawa dan Minangkabau, seperti Pawiyatan Wanito (1915), Wanito Soesilo (1918), Wanito Oetomo (1920), Serikat Kaoem Seomatra (1920) dan lain-lain. Organisasi-organisasi wanita religius juga didirikan seperti Aisyah (1971) dan Organisasi Wanita Katolik (1924). Isu-isu yang menjadi basis pergerakan ormas lain adalah pemberantasan buta huruf, penolakan poligami, dan penyebaran ajaran agama ke ormas berbasis keagamaan. Gerakan perempuan saat ini muncul sebagai bagian dari organisasi nasionalis.

Setelah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diadakan Kongres Perempuan pada tanggal 22 Desember 1928. Kongres tersebut dihadiri oleh 30 organisasi perempuan. Masalah yang dibahas adalah tentang pendidikan wanita, pernikahan dini, dan aturan pernikahan dalam Islam. Tiga mosi kepada pemerintah kolonial Belanda dihasilkan dalam kongres ini: perlu ditambahkan sekolah untuk anak perempuan, kewajiban menyebutkan ta'lik pada saat akad nikah dan adanya peraturan yang mengatur tentang tunjangan janda dan yatim piatu pemerintah kolonial Belanda.

Gerakan perempuan menunjukkan perkembangan yang progresif dengan rutin mengadakan kongres di berbagai kota seperti Jakarta (1935), Bandung (1938), dan Semarang (1941) dengan terus mengangkat masalah ketidakadilan yang dialami perempuan dalam segala aspek. Namun sayangnya pada awal pendudukan Jepang (1942) semua organisasi

perempuan dibubarkan dan hanya satu organisasi yang diperbolehkan, yaitu Fujinkai.

Keanggotaan Fujinkai diisi oleh pegawai pemerintah dimana posisi istri tergantung pada posisi suami dalam birokrasi pemerintahan. Dasar dari kegiatan Fujinkai adalah memobilisasi perempuan untuk mendukung tentara Jepang dalam perang di Asia Timur dengan menjadi tenaga kesehatan, mendistribusikan bahan makanan dan mendirikan dapur umum, memberantas buta huruf dan mempromosikan gaya hidup sederhana. Meskipun organisasi-organisasi perempuan pada masa pendudukan Jepang dibubarkan, namun banyak dari anggotanya yang melakukan kegiatan bawah tanah, terutama anggota partai sosialis dan juga perempuan komunis. Setelah kemerdekaan, Fujinkai dibubarkan dan Persatuan Perempuan Indonesia didirikan.

Dari titik ini kita dapat mengetahui, bahwasanya Fujinkai memberikan dampak positif terhadap masyarakat Indonesia, karena pergerakannya dibidang sosial. Di sisi lain Fujinkai memberikan pengetahuan dan wawasan bagi wanita Indonesia yang pada saat itu kurang mendapat akses pendidikan, apalagi bagi mereka yang berasal dari kalangan kelas bawah. Namun tidak hanya keterampilan dan pengetahuan pada aspek sosial saja yang mereka dapatkan, dalam bidang militer pun demikian. Para wanita ini mendapatkan pelatihan menggunakan senjata dalam rangka membantu Jepang dalam menghadapi sekutu.

Perempuan Pada Masa Penjajahan Jepang

Perempuan di Indonesia direpresentasikan melalui berbagai media massa seperti

perempuan pada zaman prasejarah yang direpresentasikan melalui patung megalitik yang terletak di Pasemah, Sumatera Selatan. Patung wanita lebih sedikit ditemukan dibandingkan patung pria karena peran domestik lebih banyak dilakukan oleh wanita karena pertimbangan tertentu misalnya mengasuh anak membutuhkan sosok wanita karena kegiatan melahirkan dan menyusui hanya dapat dilakukan oleh wanita.

Wanita pada masa penjajahan Belanda direpresentasikan melalui film dan novel yang menceritakan kehidupan zaman penjajahan Belanda. Dalam novel Bumi Manusia, tokoh Nyai Ontosoroh direpresentasikan sebagai sosok perempuan yang mandiri. Suatu sikap yang juga harus dikembangkan oleh masyarakat Indonesia (pribumi). Membangun kesadaran nasionalisme melalui membangun kesadaran identitas sebagai Pribumi - status yang selalu dibedakan dari Belanda (Eropa). Bagi Nyai Ontosoroh, kesadaran akan jati diri sebagai pribumi yang bebas dari perasaan rendah diri akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Berusaha melawan kekuasaan kolonial Belanda, melalui simbol perjuangannya melawan hukum Hindia Belanda untuk mendapatkan hak milik dan anak-anak yang ditinggalkan Herman Mellema (Mohamad, 2010).

Pada masa pendudukan Jepang, perempuan tidak banyak mendapat kesempatan, karena setiap gerakan selalu mendapat pengawasan ketat dari kempetai Jepang. Mengikuti keinginan Pemerintah Jepang, maka dibentuklah Gerakan Tiga Istri A dengan pimpinannya Ny. Artinah Syamsuddin. Gerakan ini dilengkapi dengan

seorang putri, yang disebut Barisan Putri Asia Raya (Wulan, 2017).

Dengan dibentuknya Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) pada bulan Maret 1943, maka garis kerja perempuan PUTERA juga terbentuk sebagai bagian dari perempuan mereka.

Selain gerakan tersebut, pemerintah Jepang mendirikan Fujinkai (Organisasi Perempuan) yang kedudukan khusus menampung segala bentuk kegiatan perempuan. Fujinkai didirikan dari tingkat pusat sampai tingkat bawah dan namanya sesuai dengan tingkat dan tempat kedudukannya, seperti ken untuk tingkat distrik dan untuk kota. Pimpinan perkumpulan ini adalah para istri Kenko (bupati). Dengan demikian Fujinkai wajib dimiliki oleh ibu-ibu atau PNS mulai dari tingkat atas hingga wilayah kecamatan. Anggotanya wajib mengerahkan tenaga kerja perempuan di tempatnya masing-masing, sedangkan yang menjadi anggotanya adalah anak perempuan berusia 15 tahun ke atas. Keanggotaan Fujinkai juga terbuka untuk orang asing.

Pada tanggal 3 November 1943 di Jakarta Toko Betsu Shi didirikan dengan pimpinan Ny. RA Abdirrahman. Persatuan ini kemudian dilengkapi dengan berdirinya Barisan Putri dengan perwakilan Siti Dahlia dan Nursyamsu. Pembantu tersebut antara lain Setiati, Malidar dan Paramita Rahayu Abdurrachman. Dalam rangka pencetakan kader, Barisan Puteri melakukan pelatihan di Bioskop Megaria Jakarta. Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dan diikuti oleh 50 orang. Peserta terdiri dari anak perempuan sebagai perwakilan dari kecamatan se-Jakarta dan luar Jakarta.

Upaya Fujinkai antara lain: a) menumbuhkan semangat cinta tanah air dan bangsa di kalangan perempuan dan menanamkan nasionalisme; b) mendorong pengorbanan dan rela menderita untuk tanah air dan bangsa; c) mempersiapkan kekuatan untuk berpartisipasi di belakang garis pertempuran; d) mendorong hidup teratur dan berhemat; e) meningkatkan hasil panen dengan menanam semua lahan dengan tanaman pangan dan sandang termasuk ubi jalar, jarak pagar, kapas dan lain-lain; f) menghidupkan pekerjaan tangan dan pekerjaan industri di rumah termasuk memintal benang, membuat kaus kaki; g) melakukan latihan yang diperlukan; h) membuka lapangan pekerjaan untuk memberantas pengangguran. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan Fujinkai pada hakekatnya tidak terlepas dari garis yang telah ditetapkan sebagaimana yang diabadikan dalam Java Hokokai yang meliputi pelaksanaan segala sesuatunya secara nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan seluruh tenaga yang dilandasi semangat persaudaraan antar bangsa dan untuk memperkuat pertahanan tanah air.

KESIMPULAN

Sejak akhir abad ke-19 hingga saat ini, gerakan perempuan tidak menentu atau pasang surut. Gelombang besar yang dibangkitkan oleh tokoh-tokoh perempuan untuk feminisme di berbagai bidang lahir dari Ketimpangan Gender. Jika mengacu secara historis saja, pada masa kolonial kedudukan perempuan begitu memprihatinkan, karena dianggap sebagai kaum yang lemah dan jauh berada di bawah laki-laki. Hal ini lah yang kemudian membuat tokoh-tokoh wanita bermunculan untuk menyuarakan kesetaraan gender. Baik secara

individu atau melalui pergerakan dalam ranah organisasi. Di Indonesia sendiri gerakan ini memunculkan nama-nama besar, dalam ranah individu ada R.A. Kartini. Untuk selanjutnya lahirlah beberapa gerakan wanita yang bertujuan untuk membantu perjuangan kemerdekaan atau demi menunjukkan kesetaraan gender kepada dunia. Sebut saja diantaranya Putri Mardika (1912), Pawiyatan Wanito (1915), Wanito Soesilo (1918), Wanito Oetomo (1920), Serikat Kaoem Seomatra (1920) dan lain-lain.

Memasuki masa pendudukan Jepang, organisasi wanita yang tadi berdiri pun dibubarkan, dan yang tersisa hanyalah Fujinkai. Kegiatan yang dilakukan Fujinkai pada hakekatnya tidak terlepas dari garis yang telah ditetapkan sebagaimana yang diabadikan dalam Java Hokokai yang meliputi pelaksanaan segala sesuatunya secara nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan seluruh tenaga yang dilandasi semangat persaudaraan antar bangsa dan untuk memperkuat pertahanan tanah air. Oleh sebab itu menjadi wajar apabila Fujinkai memberikan dampak positif juga terhadap rakyat Indonesia dan punya pengaruh besar terhadap perkembangan wawasan dan pengetahuan wanita Indonesia pada zamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, M. 2010. Peran Perempuan Indonesia dalam Perjuangan Kebangsaan (Membaca Tokoh Nyai Ontosoroh pada Novel Bumi Manusia). *Yinyang Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(2), 261-272.
- Arbaningsih, D. 2005. Kartini dari Sisi Lain: Melacak Pemikiran Kartini tentang Emansipasi Bangsa. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Aripurnami, S. 2013. Jelajah Gerakan Perempuan untuk Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Afirmasi*, 2(1), 209-235.
- Hidayat, Mukmin. 1980. Beberapa Aspek Perjuangan Kaum Wanita. Jakarta: Binacipta.
- Maria Ulfah Subadio dkk, 1983. Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Munthe, Hadriana. 2003. Perkembangan Situs dan Peranan Wanita Indonesia. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Panitia Kongres Wanita Indonesia. 1986. Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pears, R. & Connell, R. 2015. Gender norms and the economy: insights from social research. *Fem Econ*, 22: 30–53.
- Ricklefs. 2011. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: UGM Press
- Sadili, S. 1988. Pengembangan Diri Wanita dalam Keluarga dan Lingkungan Sosial. Jakarta: Djambatan.
- Sondarika, W. 2017. Peran Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Jurnal HISTORIA*, 5(2), 2337-4713.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Suhartono, 2006. Sejarah. Jakarta: Widya Utama
- Wiriaatmadja, R. 1986. Dewi Sartika. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yanti, R. D. 2020. Potret Gerakan Perempuan pada Abad Ke 20 di Batavia: Poetri Mardika 1912. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3(2), 135–144.